

PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL (PMU) DALAM KONSEP INOVASI PENDIDIKAN

Lili Marliyah

*IKIP Veteran Semarang
lilimarliyah@rocketmail.com*

Abstrak

Target pembangunan pendidikan yang diarahkan untuk menghasilkan insan Indonesia cerdas. Indeks ketercapaian sektor pendidikan memprihatinkan, sehingga menuntut tanggung jawab pemerintah untuk menetapkan sebuah lompatan kebijakan bidang pendidikan yang dapat meningkatkan nation dignity melalui program PMU. Esensi program PMU adalah merupakan program keberlanjutan dari wajar 9 tahun menjadi 12 tahun dan merupakan upaya strategis dalam konsep pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan. Dalam kerangka makro kebijakan pendidikan nasional, PMU merupakan suatu lompatan kebijakan yang signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, daya saing bangsa, peningkatan kehidupan sosial politik serta kesejahteraan masyarakat. Nilai keinovatifan program PMU terletak pada kekhasan dan kebaruan serta keinovatifan program PMU dapat dilihat dari unsur kualitatif, bersifat diusahakan dan memiliki unsur meningkatkan kemampuan. Karakteristik keinovatifan PMU dilihat dari unsur kompleksitas, trialability dan observability relatif rendah. Proses difusi dan peran agen pembaharuan program PMU masih terbatas. Dampak dari inovasi PMU adalah perubahan sosial positif maupun negatif.

Kata Kunci: Pendidikan Menengah Universal (PMU), Inovasi Pendidikan

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik menyangkut daya pikir atau daya intelektual, maupun daya emosional atau perasaan yang diarahkan kepada tabiat manusia dan kepada sesamanya. Pendidikan mempunyai peranan dalam meningkatkan kualitas manusia sebagai sumberdaya pembangunan dan menjadi titik sentral pembangunan. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender.

Pembangunan pendidikan diarahkan untuk menghasilkan insan Indonesia cerdas dan kompetitif melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi, kesetaraan dan kepastian memperoleh layanan pendidikan. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi yaitu pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dan memajukan kebudayaan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Indikator keberhasilan sektor pendidikan senantiasa dikaitkan dengan naik turunnya indeks pembangunan sumber daya manusia Indonesia, dibandingkan dengan indeks yang sama dari berbagai bangsa lain di dunia. Kondisi indeks ini sangat

memprihatinkan, sehingga menuntut tanggung jawab pemerintah untuk dapat menetapkan sebuah lompatan kebijakan bidang pendidikan yang dapat meningkatkan *nation dignity* dan indeks pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Dalam hal ini penekanan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing SDM.

Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (*life skills*) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam konteks ini peran PMU adalah memberikan kepastian kepada semua siswa bahwa siswa tidak usah lagi khawatir dengan masalah pembiayaan, akses masuk ke sekolah menengah (SMA//SMK/MA//MAK,) karena negara telah menjamin.

Selain bonus demografi yang dimiliki bangsa Indonesia yaitu menjaga konsekuensi logis keberlanjutan dari keberhasilan wajib belajar sembilan tahun. Setelah keberhasilan program wajib belajar sembilan yang dicanangkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM sudah dinyatakan berhasil karena APK untuk SMP/MI sudah tercapai yaitu 98,20 %, harus ada keberlanjutan program pendidikan. Wajib belajar sampai 12 tahun, mengingat APK SMA/MA/SMK masih rendah yaitu 70,53 %. Dengan demikian program PMU dapat meminimalisir angka putus sekolah dan agar seluruh warga usia sekolah berkesempatan untuk menikmati pendidikan.

Argumen lain yang menyebutkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara lama sekolah atau lama belajar dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, derajat kesehatan, daya saing dan pendapatan. Laporan data Statistik World Bank 2011 dan The Global Competitiveness Report 2010-2011 menyebutkan bahwa, lama sekolah (baca: PMU) berkorelasi positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Indeks (HDI).

Upaya pemberdayaan manusia seutuhnya dilaksanakan dengan cara memperlakukan manusia yang seutuhnya sebagai subjek dalam upaya pemberdayaan melalui bidang pendidikan dan kebudayaan. Manusia Indonesia memiliki hak untuk mengaktualisasikan dirinya secara optimal dalam aspek kecerdasan intelektual, spiritual, sosial, serta mewarisi dan mengekspresikan nilai-nilai budaya. Paradigma ini merupakan fondasi dari pendidikan dan kebudayaan untuk menyiapkan manusia Indonesia sebagai pribadi yang mandiri (makhluk individu), sebagai elemen dari sistem sosial yang saling berinteraksi, mendukung satu sama lain (makhluk sosial) dan toleransi dalam keragaman budaya dalam keragaman budaya serta sebagai pemimpin bagi terwujudnya kehidupan yang lebih baik di muka bumi sebagai makhluk Tuhan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa program pendidikan menengah universal (PMU) merupakan salah satu pengembangan kebijakan bidang pendidikan di Indonesia.

PEMBAHASAN

Esensi Program Pendidikan Menengah Universal

Kebijakan pemerintah tentang Program Pendidikan Menengah Universal (PMU) adalah merupakan upaya strategis dalam program pendidikan yang memberikan layanan seluas-luasnya pada seluruh warga negara untuk mengikuti pendidikan menengah yang bermutu. Hal ini mengandung pengertian konsep pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan.

Program Pendidikan Menengah Universal merupakan keberlanjutan dari program wajib belajar 9 tahun. Wajib belajar 9 tahun telah dinilai berhasil dan tuntas oleh pemerintah dengan tercapainya APK (Angka Partisipasi Kasar) SD/MI secara nasional 115,33 % dan APK SMP/MTs sebesar 98,20 % pada tahun 2010 (Sumber: Kemdikbud 2011). Pada tahun yang sama, angka partisipasi kasar (APK) SMA/SMK/MA secara nasional baru mencapai 70,53 %, dan masih ada disparitas antara APK SMP/MTs dengan APK SMA/SMK/MA sebesar 27,67 %. Artinya masih ada 27,67 % jumlah penduduk usia SM yang tidak dapat melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Inilah salah satu hal yang menjadi pertimbangan pemerintah meluncurkan program pendidikan menengah universal.

Tujuan penyelenggaraan PMU adalah untuk memberikan layanan, pelaksanaan dan pemerataan memperoleh pendidikan menengah yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia. Penyelenggaraan PMU mempunyai sasaran yaitu setiap warga negara Indonesia usia 16 (enam belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah dan mempercepat APK pendidikan menengah menjadi 97% pada tahun 2020.

Perbedaan antara wajib belajar dengan pendidikan menengah universal (PMU) terletak pada prinsip dan filosofi pelaksanaan. Jika wajib belajar diamanatkan oleh undang-undang, wajib diikuti oleh semua penduduk usia sekolah, dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah dan ada sanksi bagi yang tidak mengikuti. Pendidikan Menengah Universal (PMU) meliputi SMA/SMK/MA, yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara RI untuk mengikuti pendidikan menengah yang bermutu, difasilitasi oleh pemerintah untuk menampung penduduk usia sekolah, pembiayaan ditanggung oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, sanksi longgar bagi yang tidak mengikuti.

Adapun beberapa prinsip dasar pelaksanaan PMU meliputi: (a) mutu yang terjaga, tidak berkurang karena adanya penambahan daya tampung; (b) perimbangan SMA-SMK sesuai potensi dan kebutuhan daerah; (c) pemerataan distribusi layanan pendidikan menengah untuk menjangkau yang tidak terjangkau; (d) peningkatan kebermanfaatan (*employability*) lulusan (khususnya SMK); dan (e) pencapaian target APK di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota secara bertahap. Dengan demikian pendidikan yang bermutu bukanlah milik suatu kelompok atau perseorangan, akan tetapi pendidikan adalah hak semua warga negara tanpa membedakan suku, agama, ataupun golongan..

Sasaran Pendidikan Menengah Universal (PMU) tentunya tidak asal saja tetapi juga mempunyai sasaran yang ingin dicapai atau tujuan dari pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal (PMU) ada tiga sasaran yang ingin dicapai, yaitu:

1. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Misal, APK SMA sama dengan jumlah siswa yang duduk di bangku SMA dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 16 sampai 18 tahun. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.
2. Memperkecil disparitas antar daerah. Disparitas dapat diartikan dengan perbedaan. Jadi, memperkecil disparitas antar daerah dapat diartikan dengan memperkecil perbedaan antar daerah khususnya dalam bidang pendidikan.
3. Memperkuat pelayanan pendidikan vokasi. Istilah vokasi digunakan untuk program pendidikan menggantikan istilah profesional atau profesi. Istilah vokasi diturunkan dari bahasa Inggris, *vocation*, yang sama artinya dengan *profession*. Di Amerika Serikat, vokasi digunakan untuk menyebut pengelompokan sekolah kejuruan seperti di Indonesia.

Program pendidikan menengah universal (PMU) yang bermutu implementasinya menggunakan strategi tersedianya dan terjangkaunya Layanan Pendidikan Menengah yang Bermutu, Relevan dan Berkesetaraan, dicapai dengan menggunakan strategi sebagai berikut:

1. Penyediaan tenaga pendidik pendidikan menengah berkompeten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;
2. Penyediaan manajemen satuan pendidikan menengah berkompeten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;
3. Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, informasi berbasis riset, dan standar pendidikan menengah, dan keterlaksanaan akreditasi serta pengembangan dan pembinaan bahasa untuk pendidikan menengah;
4. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran SMA/Paket C bermutu yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;
5. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran SMK/Paket C Kejuruan bermutu yang berbasis keunggulan lokal dan relevan dengan kebutuhan daerah yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;

6. Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan SMA/SMLB/SMK/Paket C bermutu yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota.

Pendanaan PMU meliputi biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal. Pendanaan penyelenggaraan PMU menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Sumber pendanaan PMU bersumber dari APBN, APBD, masyarakat dan/atau sumber lain yang sah. Salah satu program utama yang mendukung PMU adalah penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah (SM). Sebagai hal paling inti dari BOS SM ini adalah agar beban masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke tingkat pendidikan menengah tidak terlalu berat. Karenanya, BOS SM yang akan disalurkan mulai awal tahun ajaran 2013/2014 mengalami kenaikan signifikan, yaitu mencapai Rp 1 juta per siswa per tahunnya. Selain itu, siswa juga berkesempatan mendapatkan Bantuan Siswa Miskin, Beasiswa, BOP Paket C, dan pengembangan bakat dan minat. Berkaitan dengan itu, Kemdikbud meminta kepada sekolah untuk menyampaikan daftar siswa yang tidak mampu berdasarkan urutan, karena yang tahu kondisi siswa yaitu sekolah. Nanti, dari daftar yang banyak itu disesuaikan dengan alokasi per kabupaten.

Evaluasi dan penjaminan mutu PMU dilakukan dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Evaluasi meliputi evaluasi masukan, proses dan keluaran yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. Penjaminan mutu dilakukan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan standar nasional pendidikan (SNP).

Hubungan PMU dengan kerangka kebijakan makro pendidikan di Indonesia.

Pembangunan pendidikan diarahkan untuk menghasilkan insan Indonesia cerdas dan kompetitif melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi, kesetaraan dan kepastian memperoleh layanan pendidikan. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi yaitu pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dan memajukan kebudayaan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Indikator keberhasilan sektor pendidikan senantiasa dikaitkan dengan naik turunnya indeks pembangunan sumber daya manusia Indonesia, dibandingkan dengan indeks yang sama dari berbagai bangsa lain di dunia. Posisi Indonesia yang kini berada dalam urutan 107 sangat jauh di bawah Singapura, Malaysia, Thailand dan di bawah Vietnam serta Palestina. Kondisi ini sangat memprihatinkan, sehingga menuntut tanggung jawab pemerintah untuk dapat menetapkan sebuah lompatan kebijakan bidang pendidikan yang dapat meningkatkan *nation dignity* dan indeks pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Dalam hal ini penekanan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing SDM.

Hubungan program Pendidikan Menengah Universal (PMU) dengan kerangka kebijakan makro pendidikan di Indonesia dapat dijelaskan dalam konteks program pencapaian tahun emas bagi bangsa Indonesia. Pemerintah menetapkan target tahun 2045 adalah tahun emas bagi bangsa Indonesia yaitu ulang tahun kemerdekaan yang ke 100. Momentum inilah yang akan dijadikan tujuan utama pembangunan pendidikan menengah universal. Pemerintah bersama masyarakat Indonesia harus berkomitmen untuk menyiapkan generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman yang semakin berat. Dalam konteks ini program PMU berupaya untuk menjaring usia produktif sehingga memiliki daya saing dalam kancah pergaulan dan persaingan global.

Sehubungan dengan pencapaian kebijakan makro pendidikan melalui program pendidikan menengah universal (PMU), ada beberapa faktor pendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal di antaranya adalah manfaat bonus demografi. Bonus demografi yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia merupakan sumber daya manusia yang potensial karena jumlah penduduknya lebih banyak pada angkatan kerja. Jika bonus demografi tidak dimanfaatkan dan dikelola dengan baik maka akan menjadi bencana demografi atau *demographic disaster* seperti pengangguran, kriminalitas, narkoba dan lain-lain. Apabila bonus demografi dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, maka hal ini merupakan potensi dan kekuatan yang besar untuk meningkatkan dan mempertahankan kesinambungan pembangunan nasional dan keberlangsungan kehidupan berbangsa.

Selain bonus demografi yang dimiliki bangsa Indonesia yaitu menjaga konsekuensi logis keberlanjutan dari keberhasilan wajib belajar sembilan tahun. Setelah keberhasilan program wajib belajar sembilan yang dicanangkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM sudah dinyatakan berhasil karena APK untuk SMP/MI sudah tercapai yaitu 98,20 %, harus ada keberlanjutan program pendidikan. Wajib belajar sampai 12 tahun, mengingat APK SMA/MA/SMK masih rendah yaitu 70,53 %. Dengan demikian program PMU dapat meminimalisir angka putus sekolah dan agar seluruh warga usia sekolah berkesempatan untuk menikmati pendidikan.

Argumen lain yang menyebutkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara program PMU dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, derajat kesehatan, daya saing dan pendapatan. Laporan data Statistik World Bank 2011 dan The Global Competitiveness Report 2010-2011 menyebutkan bahwa, lama sekolah (baca: PMU) berkorelasi positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Indeks (HDI). Lama sekolah pada laporan itu memiliki korelasi positif yang sangat tinggi dengan nilai PDB per kapita (koefisien korelasi 0,93). Demikian juga lama sekolah memiliki korelasi positif yang sangat tinggi dengan nilai Global Competitiveness Indeks GCI (0,96).

Program pendidikan menengah universal (PMU) merupakan lompatan yang sangat signifikan dalam pelayanan pendidikan dilihat dari kerangka kebijakan makro pendidikan di Indonesia.

Nilai inovatif dan karakteristik keinovatifan Program Pendidikan Menengah

Inovasi (*innovation*) adalah ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai sesuatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang (masyarakat), baik itu berupa hasil invensi maupun diskoveri. Inovasi diadakan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Pengertian inovasi dari beberapa ahli yaitu suatu ide, praktik, atau objek/benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. (Everett M. Rogers, 2003). Inovasi adalah suatu perubahan yang sifatnya khusus, memiliki nuansa kebaruan, dan di sengaja melalui suatu program yang jelas dan direncanakan terlebih dahulu, serta dirancang untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari suatu sistem tertentu. Oleh karena itu dalam menyikapi suatu inovasi, diperlukan suatu pemahaman yang baik tentang substansi inovasinya itu sendiri, hal ini dimaksudkan agar inovasi dapat benar-benar memberi nilai tambah bagi kehidupan.

Mengingat hal tersebut, maka dunia pendidikan sebagai suatu sub sistem kehidupan masyarakat perlu menyikapi dengan terbuka berbagai inovasi yang ada dalam dunia pendidikan, maupun yang terjadi dalam bidang kehidupan lainnya untuk berupaya mengintegrasikannya agar dapat dicapai suatu kondisi pendidikan yang tidak tertinggal dengan perubahan yang terjadi di masyarakat sebagai akibat akumulasi inovasi.

Program Pendidikan Menengah Universal (PMU) merupakan suatu bentuk **inovasi** di bidang pendidikan karena mengandung beberapa ciri sebuah inovasi yaitu :

1. Memiliki kekhasan atau khusus artinya suatu inovasi memiliki ciri yang khas dalam arti ide, program, tatanan, sistem termasuk kemungkinan hasil yang diharapkan. Pendidikan Menengah Universal memiliki ciri yang khas dalam bentuk program pendidikan di tingkat menengah yang memberikan layanan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk mengikuti pendidikan menengah yang bermutu. Selain itu PMU mengandung kemungkinan hasil yang diharapkan yaitu mempercepat pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan menengah menjadi 97% pada tahun 2020.
2. Kebaruan, dalam pengertian baru atau dalam arti belum dipahami, belum diterima, atau belum dilakukan oleh pengadopsi. Program pendidikan menengah universal (PMU) memiliki ciri kebaruan, karena program ini pada saat diluncurkan belum dipahami dan belum diterima atau belum dilakukan oleh pengadopsi. Letak kebaruan PMU pada program pendidikan yang memberikan akses seluas-luasnya dalam memperoleh pendidikan bermutu pada tingkat pendidikan menengah.
3. Bersifat "**kualitatif**" artinya program PMU memungkinkan adanya reorganisasi atau restrukturisasi komponen/unsur yang sudah ada, bukan pada penambahan unsur atau komponen yang sudah ada. Program PMU dapat dimaknai merupakan kelanjutan dari program pendidikan dasar 9 tahun menjadi 12 tahun, sehingga program PMU ini merupakan restrukturisasi komponen atau unsur yang sudah ada sebelum program PMU ini diluncurkan.

4. Bersifat “**diusahakan**”, berarti Program PMU dilakukan dengan sengaja dan direncanakan. Program PMU direncanakan, dipertimbangkan dan dirancang untuk menjadi sebuah program dalam bidang pendidikan yang dianggap merupakan lompatan yang signifikan untuk pencapaian APK pendidikan menengah yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
5. **Meningkatkan kemampuan**”, artinya tujuan utama dari inovasi adalah kapasitas subjek yang diperbarui. Program PMU memiliki tujuan untuk memberikan layanan, perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan menengah yang bermutu bagi setiap warga negara. Dengan demikian program PMU dapat menjaring usia produktif untuk ditingkatkan kemampuannya sehingga dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dalam berpartisipasi dan menyongsong Tahun Emas 2045.

Adapun beberapa prinsip dasar pelaksanaan PMU meliputi (a) mutu yang terjaga, tidak berkurang karena adanya penambahan daya tampung; (b) perimbangan SMA-SMK sesuai potensi dan kebutuhan daerah; (c) pemerataan distribusi layanan pendidikan menengah untuk menjangkau yang tidak terjangkau; (d) peningkatan kebecerjaan (*employability*) lulusan (khususnya SMK); dan (e) pencapaian target APK di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota secara bertahap.

Selain itu nilai inovasi program pendidikan menengah universal (PMU) sebagai suatu konsep inovasi seperti di atas ditunjang oleh beberapa hal yang tersirat pada kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan yakni pada **pergeseran paradigma pendidikan dan kebudayaan** yang meliputi:

1. Perubahan wajib belajar menjadi hak belajar
Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Oleh karena itu paradigma wajib belajar usia 7 sampai 15 tahun digeser menjadi hak belajar yang menjamin kepastian bagi semua warga negara untuk memperoleh pendidikan dasar dan menengah sampai usia 16-18 tahun. Dengan pergeseran paradigma tersebut, pemerintah wajib menyediakan sarana prasarana dan pendanaan demi terselenggaranya pendidikan bagi warga negaranya.
2. Kesetaraan dalam pendidikan
Selanjutnya juga warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil, warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial, serta warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus dan/atau layanan khusus.
3. Pendidikan komprehensif melalui penyelarasan pendidikan dan pembudayaan.
Pendidikan komprehensif merupakan pendidikan yang mampu mengeksplorasi seluruh potensi peserta didik yang berupa potensi kekuatan batin, karakter,

intelektual dan fisik. Di samping itu potensi tersebut dapat diintegrasikan menjadi kekuatan peserta didik melalui pendidikan. Perubahan dasar perencanaan pendidikan yang berdasarkan suplai menjadi berdasarkan kebutuhan; terkandung penyelarasan pendidikan dan kebudayaan serta pendidikan karakter khususnya pendidikan karakter bangsa yang harus ditanamkan sejak pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi.

4. Perubahan fungsi sekolah negeri menjadi sekolah publik.

Sekolah-sekolah negeri ke depan harus bergeser menjadi sekolah publik. Bila sebelumnya sekolah negeri hanya dipakai siswa untuk aktivitas belajar dari siswa sekolah tersebut, ke depan fungsi dan pemanfaatan sekolah negeri harus ditingkatkan, tidak hanya untuk siswa dari sekolah itu, tetapi pada saat tidak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan anggota masyarakat. dengan ketentuan yang terkendali. Dengan demikian sekolah-sekolah negeri dapat dimanfaatkan seluas-luasnya.

5. Pengintegrasian kebudayaan dalam pendidikan ;

Untuk memperkuat integrasi fungsi kebudayaan dalam pendidikan perlu penguatan budaya di masyarakat melalui pemberian fasilitasi sarana untuk sanggar/komunitas adat/sasana sarasehan, pemberdayaan lembaga kepercayaan dan komunitas adat sebagai upaya untuk menguatkan kantong-kantong budaya di daerah, kegiatan berupa pemberian fasilitasi dahulu belum mempunyai standar dan kriteria yang jelas, untuk itu diperlukan pembuatan POS dan akreditasi dari lembaga kepercayaan dan komunitas adat yang akan difasilitasi

6. Pergeseran fungsi kebudayaan dari tontonan menjadi tuntunan

Semestinya kebudayaan untuk membangun manusia Indonesia yang berjiwa dan berkarakter sehingga fungsi kebudayaan mengarah pada kemandirian, gotong royong, toleransi sebagai wujud tuntunan dalam berbangsa dan bernegara. Untuk mengembalikan kebudayaan sebagai tuntunan dilakukan dengan upaya melalui penggalian, penanaman dan penguatan nilai/filosofi/makna kearifan lokal dalam masyarakat sehingga dapat dipetik manfaatnya.

7. Pengelolaan kebudayaan secara integratif multi sektor.

Pengelolaan kebudayaan tidak lagi menjadi domain sektor kebudayaan saja, tetapi perlu melibatkan sektor yang lain. Lingkup pengelolaan kebudayaan yang semula hanya dalam ruang yang sempit seperti candi, masjid atau bangunan kuno dan lainnya tetapi lingkungannya meluas dalam satu kawasan yang di dalamnya termasuk manusia, lingkungan, nilai daninggalan budaya itu sendiri.

Atribut sebuah inovasi adalah karakteristik yang dimiliki oleh suatu inovasi yang merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan laju atau kecepatan adopsi inovasi oleh suatu sistem sosial. Faktor-faktor yang dijadikan pertimbangan pihak adopter (pengguna inovasi) dalam membuat keputusan untuk menerima atau menolak produk suatu inovasi jika dikaitkan dengan pemikiran Everett M. Rogers (1983) dalam *diffusion of innovation dipengaruhi* oleh 5 (lima) karakteristik inovasi yaitu : 1) *Relative advantage*

(Keunggulan relatif) ; 2) *Compatibility* (Kompatibilitas atau konsisten); 3) *Complexity* (Kompleksitas/kerumitan); 4) *Trialability* (Kemampuan untuk dapat diuji); 5) *Observable* (Kemampuan untuk dapat diamati).

Esensi karakteristik inovasi program Pendidikan Menengah Universal (PMU) adalah :

1. Keunggulan relatif adalah derajat di mana suatu inovasi dianggap lebih baik dan unggul dari yang pernah ada sebelumnya. Hal ini dapat diukur dari beberapa segi, seperti segi ekonomi, sosial, kenyamanan, kepuasan dan lain-lain. Program PMU memiliki keunggulan relatif terutama dilihat dari paradigma kebijakan yang mendasarinya. Program PMU jika dimaknai sebagai wajib belajar 12 tahun, di mana pemerintah menjamin lulusan pendidikan dasar dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah yang bermutu, maka di sinilah letak keunggulan relatifnya. Hal ini disebabkan program PMU belum pernah ada sebelumnya. Dari segi sosial, program ini memiliki keunggulan relatif karena PMU merefleksikan pergeseran paradigma dalam pendidikan (seperti telah disebutkan di atas). Semakin besar keunggulan relatif dirasakan oleh pengadopsi, maka semakin cepat inovasi tersebut dapat diadopsi.
2. Kompatibilitas adalah derajat di mana inovasi tersebut dianggap konsisten dengan nilai-nilai yang berlaku, pengalaman masa lalu dan kebutuhan pengadopsi. Pengguna inovasi (adopter) juga akan mempertimbangkan pemanfaatan inovasi berdasarkan konsistensinya pada nilai-nilai, pengalaman dan kebutuhannya. Dilihat dari karakteristik ini PMU memiliki kompatibilitas yang tinggi, karena program ini konsisten dengan nilai-nilai yang berlaku, terutama PMU memiliki prinsip kesetaraan dalam pendidikan. Prinsip ini mengandung arti bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.
3. Kompleksitas adalah derajat di mana inovasi dianggap sebagai suatu yang sulit untuk dipahami dan digunakan. PMU memiliki kompleksitas yang relatif rendah, karena program ini mudah dipahami dan digunakan oleh pengadopsi. Mengingat program PMU merupakan lanjutan dari program wajar 9 tahun.
4. *Trialability* adalah derajat di mana suatu inovasi dapat diuji-coba pada batas tertentu. Suatu inovasi yang dapat di uji-cobakan dalam setting sesungguhnya umumnya akan lebih cepat diadopsi. Dilihat dari karakteristik ini program PMU derajatnya trialabilitinya relatif rendah karena untuk melihat keberhasilan suatu program pendidikan yang baru saja diluncurkan memerlukan waktu yang lama, sehingga pengadopsi akan relatif memerlukan waktu yang lama pula untuk dapat melihat hasil uji coba program pendidikan menengah universal (PMU). Selain itu juga derajat ini akan terlihat jika dihubungkan dengan masalah pendanaan program PMU.
5. *Observability* adalah derajat di mana hasil suatu inovasi dapat terlihat oleh orang lain. Semakin mudah seseorang melihat hasil dari suatu inovasi, semakin besar

kemungkinan orang atau sekelompok orang tersebut mengadopsi. Dilihat dari karakteristik ini, PMU relatif rendah derajatnya. Keberhasilan program PMU sulit atau memerlukan waktu yang lama untuk dapat dilihat atau diamati oleh pengadopsi Program PMU. Selain itu kendala-kendala yang mungkin dihadapi pada proses implementasi PMU, terutama masalah pendanaan yang harus dipikul baik oleh pemerintah pusat, daerah maupun masyarakat.

Proses Difusi dan Keteradopsian Program Pendidikan Menengah Universal (PMU)

Difusi didefinisikan sebagai suatu proses di mana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu selama jangka waktu tertentu terhadap anggota suatu sistem sosial. Difusi dapat dikatakan juga sebagai suatu tipe komunikasi khusus di mana pesannya adalah ide baru. Di samping itu, difusi juga dapat dianggap sebagai suatu jenis perubahan sosial yaitu suatu proses perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi sistem sosial. Dapat dikatakan bahwa difusi inovasi merupakan satu bentuk komunikasi yang berhubungan dengan suatu pemikiran baru.

Tujuan utama difusi inovasi adalah diadopsinya suatu inovasi oleh anggota sistem sosial tertentu. Anggota sistem sosial dapat berupa individu, kelompok informal, organisasi dan atau sub sistem. Selain itu tujuan dari inovasi adalah untuk mencapai kesetimbangan dinamis dalam sistem sosial.

Proses difusi inovasi melibatkan empat unsur utama, meliputi: a) inovasi; b) saluran komunikasi; c) kurun waktu tertentu; dan d) sistem sosial. Proses difusi pendidikan menengah universal (PMU) dapat dijelaskan bahwa PMU merupakan suatu inovasi pendidikan, karena kebijakan ini esensinya adalah kelanjutan wajar 9 tahun yaitu menjadi wajar 12 tahun. Program PMU ini adalah kebijakan yang baru diluncurkan pada tahun 2013. Penggunaan istilah PMU dipilih Kemdikbud dengan berbagai alasan. Istilah Wajib Belajar atau Wajar harus berlandaskan dasar hukum yang kuat. Sementara dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional hanya disebutkan Wajar 9 Tahun, sedangkan untuk Wajar 12 Tahun tidak dikenal. Istilah pendidikan universal pertama kali diperkenalkan UNESCO. Untuk menyebut Wajar 9 tahun, UNESCO tidak menggunakan istilah "*compulsory basic education*", melainkan "*universal basic education*". Selain itu, istilah Wajar juga mengandung unsur pemaksaan dan konsekuensinya ada sanksi bagi yang tidak melakukannya. Sementara PMU esensinya seperti Wajar, tetapi tanpa sanksi, dan tidak mengenal istilah memaksa. Kata yang digunakan justru "mendorong" agar seluruh lulusan SMP/ sederajat dapat menempuh pendidikan ke jenjang menengah.

Komunikasi adalah proses di mana partisipan menciptakan dan berbagi informasi satu sama lain untuk mencapai suatu pemahaman bersama. Dalam hal ini difusi dapat dipandang sebagai suatu tipe komunikasi khusus di mana informasi yang dipertukarkannya adalah ide baru (PMU). Dengan demikian, esensi dari proses difusi adalah pertukaran informasi di mana seorang individu mengkomunikasikan suatu ide baru ke seseorang atau beberapa orang lain.

Komunikasi yang dimaksudkan dalam proses difusi Pendidikan Menengah Universal (PMU) adalah upaya mempertukarkan gagasan PMU oleh seseorang atau unit tertentu yang telah mempunyai pengetahuan dan pengalaman tentang pendidikan menengah universal kepada seseorang atau unit lain yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai program PMU (*potential adopter* melalui saluran komunikasi tertentu) dalam hal ini semua pemangku kepentingan bidang pendidikan, khususnya yang terkait dengan program pendidikan menengah universal.

Saluran komunikasi yang digunakan dalam proses difusi PMU menggunakan dua kategori saluran yaitu :

1. Saluran Media massa (*mass media channel*), media massa dapat berupa radio, televisi, surat kabar, web, dan lain-lain. Kelebihan media massa adalah dapat menjangkau audiens yang banyak dengan cepat dari satu sumber.
2. Saluran antar pribadi melibatkan upaya pertukaran informasi tatap muka antara dua atau lebih individu.

Unsur ketiga dalam proses difusi PMU adalah waktu. Waktu merupakan salah satu unsur penting dalam proses difusi. Dimensi waktu, dalam proses difusi, berpengaruh dalam proses keputusan inovasi, yaitu tahapan proses sejak seseorang menerima informasi pertama sampai ia menerima atau menolak inovasi, keinovativan individu atau unit adopsi lain, dan rata-rata adopsi dalam suatu sistem, yaitu seberapa banyak jumlah anggota suatu sistem mengadopsi suatu inovasi dalam periode waktu tertentu. Waktu yang sudah berjalan dalam proses difusi program PMU selama **10 bulan** dari mulai diundangkannya Permen No 80 tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal (PMU).

Unsur selanjutnya dari proses difusi PMU adalah sistem sosial. Sistem sosial adalah satu set unit yang saling berhubungan yang tergabung dalam suatu upaya pemecahan masalah bersama untuk mencapai suatu tujuan. Anggota dari suatu sistem sosial dapat berupa individu, kelompok informal, organisasi dan atau sub sistem. Proses difusi PMU dalam kaitannya dengan sistem sosial ini dipengaruhi oleh struktur sosial, norma sosial, peran pemimpin dan agen perubahan, tipe keputusan inovasi dan konsekuensi inovasi.

Proses difusi program PMU berjalan masih relatif lamban dalam mencapai sasaran yang diharapkan. Kondisi ini terjadi disebabkan program ini masih relatif baru yaitu 10 bulan dari diundangkannya kebijakan PMU. Selain itu keterjangkauan proses difusi melalui saluran komunikasi media masa masih terbatas baik secara kuantitatif dan kualitatif. Proses difusi PMU efektif dilakukan terbatas pada tingkat kelembagaan atau organisasi di lingkungan pemerintahan, terutama jajaran terkait lembaga kependidikan. Masyarakat yang terkait dengan program PMU dalam hal ini masyarakat luas terutama masyarakat *middle low* yang relatif tidak terjangkau media masa dan teknologi informasi lainnya cenderung belum mengetahui bahkan belum dapat menerima program PMU yang baru dirintis implementasinya oleh pemerintah tersebut. Jika digambarkan dalam kurve S

tentang kecepatan relatif dari diadopsinya program PMU sejauh ini akan berbentuk kurva “S tegak”.

Jejaring Difusi Inovasi Program PMU

Difusi adalah proses komunikasi inovasi antara warga masyarakat (anggota sistem sosial) dengan menggunakan saluran tertentu dalam waktu tertentu. Proses komunikasi ditekankan dalam arti terjadinya saling tukar informasi (hubungan timbal balik) antar beberapa individu baik secara memusat (*convergent*) maupun memencar (*divergent*) yang berlangsung secara spontan. Dengan adanya komunikasi ini akan terjadi kesamaan pendapat antar warga masyarakat tentang inovasi. dalam sistem difusi desentralisasi penentuan itu dilakukan oleh klien (warga masyarakat) bekerja sama dengan beberapa orang yang telah menerima inovasi.

Jaringan difusi adalah jaringan sosial yang ada di masyarakat yang dimanfaatkan dalam proses difusi inovasi. Jaringan sosial adalah keterkaitan hubungan dan komunikasi antar individu dalam masyarakat yang disebabkan oleh berbagai kepentingan dan sebab. Jaringan difusi program pendidikan menengah universal (PMU) adalah jaringan sosial yang dimanfaatkan dalam proses mendifusikan program pendidikan menengah universal (PMU).

Proses penyebaran informasi tentang program PMU sangat efektif jika didifusikan melalui saluran media massa. Namun untuk membujuk calon adopter agar segera membuat keputusan adopsi, peran *media interpersonal* menjadi lebih penting. Dalam tahapan yang disebut tahap persuasi itulah jaringan sosial yang ada dalam masyarakat sangat berguna bagi proses difusi program PMU. Proses penyebaran informasi tentang program PMU yang sedang dan sudah dilakukan adalah dalam bentuk sosialisasi yang lebih bersifat model arus komunikasi dilakukan *one-step flow models* dan *two-step flow models*.

Dalam proses *one-step flow models* pesan yang disampaikan mengenai program PMU disampaikan mengalir tanpa ada perantara (audience bisa langsung mengakses langsung media). Model ini memiliki beberapa kelemahan karena bukan *all powerful*, karena tidak semua media mempunyai kekuatan yang sama dalam menyampaikan program PMU. Kelemahan lainnya adalah kemungkinan timbulnya reaksi yang berbeda dari masyarakat tentang program PMU walaupun menerima dari media masa yang sama.

Dalam proses *two-step flow models* pesan yang disampaikan mengenai program PMU dari media massa tidak seluruhnya langsung mengenai masyarakat sasaran, tetapi pesan tersebut disampaikan oleh pihak tertentu artinya pihak tertentu tersebut dikenal dengan *opinion leaders* (para birokrat di lingkungan pemerintahan pusat dan daerah, utamanya di lingkungan dinas pendidikan). Melalui sosialisasi program PMU di tingkat propinsi dan Kota/kabupaten serta organisasi di bawah birokrasi pemerintahan misalnya Dharmawanita, PKK, dan organisasi lainnya. Tahap pertama sumber media untuk pemimpin opini (transfer informasi), lalu tahap ke-dua pemimpin opini kepada khalayak/pengikut.

Proses dalam jejaring difusi program PMU mengalir secara alami sepanjang hubungan interpersonal yang ditingkatkan melalui konsep *homophily* dan *heterophily*. Konsep komunikasi *homophily* dalam program PMU sering terjadi namun secara terbatas di kalangan para agen pembaharu. Jika komunikasi konsep *homophily* sering terjadi maka komunikasi menjadi lebih efektif ketika sumber dan penerima adalah *homophilous*. Komunikasi efektif memberi kemudahan bagi yang terlibat di dalam sistem dan difusi program PMU akan semakin menyebar.

Proses yang terjadi dalam jejaring difusi program PMU sebenarnya diawali juga dalam pengertian model alur komunikasi *heterophily*, ketika para kerator menetapkan keputusan suatu program pendidikan menengah universal yang digagas dan ditetapkan melalui Permen NO 80 tahun 2013, maka jejaring difusi PMU menggunakan konsep alur komunikasi *heterophily*. Arus informasi mengalir dari para penggagas kepada para agen pembaharu yang relatif *heterophily*. *Heterophily* sering menghubungkan dua kelompok dan membagi perbedaan individu secara sosial. Mata rantai hubungan antar pribadi ini penting terutama untuk membawa informasi tentang program PMU.

Adapun jaringan kemitraan dalam proses difusi program pendidikan menengah universal (PMU), sedikitnya melibatkan 12 lembaga di lingkungan dinas pendidikan, dan lembaga lainnya yaitu: 1) .Kemendiknas; 2) Dewan Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota; 3) PMP; 4) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; 5) Komite Sekolah /Satuan Pendidikan di Kabupaten/Kota; 6) Media cetak, radio dan televisi; 7) Perguruan Tinggi Negeri/Swasta; 8) Dunia usaha/industri/kerja; 9) Profesional; 10) Asosiasi profesi; 11) Lembaga Bantuan Hukum; 12) Pengamat pendidikan/ pakar pendidikan

Sistem difusi sentralistik PMU dipadu dengan sistem difusi desentralistik PMU dan/atau penerapan kedua sistem tersebut disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam sistem difusi sentralistik program PMU, difusi dilakukan oleh pemerintah dan/atau ahli; sementara itu, dalam sistem difusi desentralistik, program PMU datang dari ekperimentasi lokal yang sering dilakukan oleh pengguna itu sendiri dan atau atas dasar saling tukar informasi untuk mencapai suatu pemahaman bersama. Difusi lewat *network horizontal* dilakukan unit lokal dengan tingkat kemungkinan reinvensi yang tinggi tentang Program PMU.

Peran Agen Perubahan (*change agent*) dan *Opinion Leader*

Dalam difusi program PMU diperlukan orang-orang yang berperan sebagai agen perubahan. Agen perubahan ini menjadi penghubung antara calon adopter dengan inovator. Agen perubahan atau *change agent* adalah seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain agar sependapat dengan tujuan yang diinginkan oleh suatu institusi yang mengadakan perubahan. Agen perubahan adalah salah satu unsur penting dalam proses difusi program PMU. Agen pembaharu program PMU adalah sekelompok kecil orang tertentu sebagai penentu tentang berbagai hal tentang program PMU, seperti; kapan dimulainya difusi PMU, dengan saluran apa, siapa yang akan menilai hasilnya, dan melakukan koreksi, menjadi penghubung antara kreator dengan adopter, dan sebagainya

dalam suatu sistem sosial. Agen perubahan PMU memiliki akses banyak kepada institusi penggagas PMU dalam ini Kemendiknas, terutama memiliki akses terhadap ide PMU yang akan atau sedang didifusikan.

Agen perubahan PMU diperlukan terutama dalam: 1) mengembangkan kebutuhan untuk berubah, 2) mengadakan pertukaran informasi dan menjalin hubungan, 3) mendiagnosa masalah, 4) menciptakan minat pada khalayak sasaran untuk berubah, 5) mengubah minat menjadi tindakan, 6) memantapkan adopsi dan mencegah diskontinyu, dan 7) mencapai suatu hubungan baik

Apabila ditinjau lebih lanjut ada beberapa peran yang harus dilaksanakan oleh agen perubahan PMU yaitu peran agen perubahan sebagai penghubung atau linker terutama untuk menyampaikan berbagai pesan atau informasi tentang PMU. Sebagai penghubung, agen perubahan melakukan kegiatan-kegiatan: 1) mendifusikan PMU kepada khalayak sasaran, 2) menyalurkan kebutuhan dan masalah khalayak sasaran kepada institusi perancang perubahan dalam hal ini pemerintah (Kemendiknas) atau *change agency*, 3) menyalurkan masukan atau balikan mengenai PMU kepada Kemendiknas, dan 4) membuat evaluasi atas kesuksesan atau kegagalan difusi yang dilakukannya.

Kesuksesan agen perubahan PMU tergantung pada : (a) upayanya menghubungi khalayak sasaran, (b) orientasinya yang lebih kepada khalayak sasaran, bukan pada Kemendiknas, (c) tingkat kesesuaian program PMU dengan kebutuhan khalayak sasaran, (d) empatinya kepada khalayak sasaran, (e) homofilitasnya dengan khalayak (f) kredibilitasnya di mata khalayak, (g) tingkat kesejalanannya dengan pemimpin opini dan (h) kemampuan khalayak sasaran mengevaluasi program PMU.

Tugas Agen Perubahan di Bidang Pendidikan Menengah Universal (PMU) secara umum adalah : a) Mensosialisasikan program pendidikan menengah universal (PMU) kepada kepala birokrasi pemerintah daerah, dan kepala dinas dengan jajaran terkait di seluruh daerah masing-masing dan cara implementasi penyelenggaraan pendidikan menengah universal (PMU); b) Mendiagnosa masalah yang dihadapi khalayak sasaran sehingga diketahui mengapa pelaksanaan program PMU yang digunakan itu tidak sesuai dengan kebutuhan atau sasaran; c) Membangkitkan kebutuhan untuk berubah, agen pembaharu harus membantu khalayak sasaran, agar mereka sadar akan perlunya pendidikan menengah universal (PMU).

Hubungan agen perubahan program PMU secara positif tergantung pada lebih tingginya khalayak sasaran dibandingkan agen pembaharu dalam hal (a) status sosial, (b) partisipasi sosial, (c) pendidikan dan (d) kekosmopolitannya. Dari beberapa kondisi agen perubahan program PMU di atas dapat dijelaskan bahwa peran agen pembaharu program PMU masih relatif terbatas pada khalayak sasaran pada tingkat lembaga-lembaga birokrasi pemerintahan serta organisasi terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Selain itu peran agen perubahan PMU jika dilihat dari tugasnya sebagai *linker*, masih relatif terbatas pada kegiatan difusi program PMU, sedangkan kegiatan lain terutama dengan tugas melakukan evaluasi tentang keberhasilan atau kegagalan

program PMU dan menyalurkan balikan atau masukan kepada Kemendiknas, belum dilakukan. Hal ini mengingat waktu peluncuran dan proses difusi program PMU relatif belum lama dan proses difusi belum secara keseluruhan mencapai target khalayak sasaran.

Opinion leaders atau pemimpin opini adalah individu yang memimpin dalam mempengaruhi pendapat orang lain tentang program PMU.. *Opinion leaders* adalah orang yang mempunyai keunggulan dari masyarakat kebanyakan. *Opinion leaders* lebih mudah menyesuaikan diri dengan masyarakatnya, lebih kompeten dan lebih tahu memelihara norma yang ada. *Opinion leaders* lebih mudah menyesuaikan diri dengan masyarakatnya, lebih kompeten dan lebih tahu memelihara norma yang ada. Jadi, *Opinion leaders* dapat dikatakan sebagai orang-orang berpengaruh, yakni orang-orang tertentu yang mampu memengaruhi sikap orang lain secara informal dalam suatu sistem sosial.

Perilaku pemimpin opini penting dalam menentukan tingkat adopsi program PMU dalam suatu system sosial. Bahkan bentuk kurva S difusi terjadi karena pemimpin opini sekali mengadopsi kemudian memberitahu orang lain tentang program PMU yang diadopsinya. Kemampuan dirinya memelihara norma menjadi salah satu konsekuensi logis bentuk pelayanan atau suri teladan yang diberikan atau ditunjukkan kepada masyarakatnya.

Dalam kenyataannya, sejauh ini orang-orang yang berpengaruh serta berperan dalam tingkat adopsi program PMU, masih relatif terbatas pada level jajaran birokrasi pemerintahan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Para *opinion leader* di tingkat khalayak sasaran program PMU belum intensif dilakukan, disebabkan tingkat keteradopsian program PMU masih relatif rendah.

Dampak program PMU terhadap perubahan sosial dalam dinamika pembangunan pendidikan di Indonesia

Tujuan utama Pendidikan Menengah Universal (PMU) adalah meningkatkan kualitas penduduk Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa, peningkatan kehidupan sosial politik serta kesejahteraan masyarakat. Tercapainya tujuan program PMU dapat diartikan merupakan dampak positif diimplementasikannya program pendidikan menengah universal (PMU).

Setiap program kebijakan pendidikan, termasuk program pendidikan universal (PMU) akan memiliki dampak pada sistem sosial masyarakat di mana program tersebut diimplementasikan. Dampak yang ditimbulkan merupakan bentuk perubahan yang terjadi, termasuk tatanan sosial dan tatanan sistem pendidikan yang diharapkan oleh tujuan program yang diimplementasikan. Dampak tersebut dapat meliputi dampak perubahan positif yang diharapkan dan kemungkinan dampak negatif pelaksanaan suatu program. Adapun kemungkinan dampak positif dan negatif meliputi:

1. Beberapa dampak positif dari perubahan yang diharapkan dari program PMU meliputi: 1) Terjadi peningkatan akses publik ke tingkat sekolah menengah (SMA/ sederajat); 2) Angka partisipasi kasar (APK) tingkat SMA/ sederajat akan makin

- tinggi, Hingga 2012 ini, APK SMA/ sederajat secara nasional masih berada di bawah 70%. Dengan adanya PMU, APK ini akan naik menjadi sekitar 97% pada tahun 2020. Hal ini sekaligus merupakan percepatan APK pendidikan menengah. Tanpa PMU atau “Wajar 12 Tahun”, APK sebesar itu baru bisa tercapai pada tahun 2040. Dengan adanya PMU, peluang masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA/ sederajat semakin besar.; 3) Terjadi penambahan jumlah peserta didik yang berpeluang melanjutkan ke perguruan tinggi, Hal ini sejalan dengan ditingkatkannya layanan pendidikan tinggi, termasuk akan dibangunnya akademi komunitas (*community college*) di setiap kabupaten/kota menyusul disahkannya UU Pendidikan Tinggi; 4) Penyeimbangan antara SMA dan SMK. Hal ini, akan mengurangi perbedaan jumlah kedua jenis sekolah menengah ini; dan sekaligus menambah jumlah lulusan yang siap kerja terutama dari SMK tanpa mengurangi jumlah yang siap melanjutkan ke perguruan tinggi baik dari SMA maupun SMK; 5) Meningkatkan dan menguatnya pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi yang dimaksud disini adalah pendidikan kejuruan di tingkat menengah, bukan pendidikan kejuruan di tingkat perguruan tinggi. PMU akan memperbaiki kualitas angkatan kerja. Pengetahuan dan keterampilan lulusan SMA/SMK lebih memadai ketimbang lulusan SD/ SMP. sedangkan berdasarkan usia, lulusan SMA/SMK lebih siap memasuki dunia kerja; 6) Mobilitas vertikal para lulusan SMA/SMK juga akan cenderung lebih mudah ketimbang lulusan SD/ SMP. Dalam hal ini kehadiran PMU ini boleh dikatakan berada satu langkah di depan (*one step ahead*) di tengah-tengah dunia pendidikan kita. Menjadi terobosan dalam meningkatkan kualitas SDM bangsa Indonesia; sekaligus memperbaiki kinerja dalam kehidupan sosial dan ekonomi.
2. Beberapa dampak negatif yang akan terjadi dari pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal (PMU), di antaranya adalah masalah anggaran. Dengan diberlakukannya sistem baru, pastilah ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan. Jika dahulu, pemerintah hanya mencanangkan Wajar 9 tahun, maka pemerintah hanya wajib mengalokasikan dana pendidikan khususnya untuk BOS (Bantuan Operasional Sekolah) bagi pendidikan selama 9 tahun yaitu SD dan SMP. Namun, dengan rencana Pendidikan Menengah Universal (PMU), maka pemerintah juga harus mengalokasikan dana yang jauh lebih besar, karena jenjang yang dicakup kini lebih lama yaitu 12 tahun dari SD, SMP sampai SMA/SMK.
 3. Dampak negatif lain yang harus diwaspadai adalah masalah transparansi dan akuntabilitas pendanaan program Pendidikan Menengah Universal (PMU). Penerapan PMU tanpa diimbangi oleh perbaikan taraf ekonomi dengan signifikan, maka target PMU tidak akan tercapai dengan maksimal. Begitu pula tanpa transparansi dan perubahan cara pandang komunitas sekolah, penerapan PMU hanya akan menjadi ladang baru dan melanggengkan potensi serta modus korupsi yang lama disinyalir telah terjadi. Dengan demikian, penerapan PMU tidak hanya layak untuk kita sambut dengan gembira, tetapi juga harus diwaspadai agar tidak terjebak oleh masalah ekonomi serta budaya korupsi akut yang berkembang di masyarakat.

SIMPULAN

1. Esensi program Pendidikan Menengah Universal (PMU) adalah merupakan program keberlanjutan dari wajar 9 tahun menjadi wajar 12 tahun. Program PMU merupakan upaya strategis dalam program pendidikan yang memberikan layanan seluas-luasnya pada seluruh warga negara untuk mengikuti pendidikan menengah yang bermutu. Hal ini mengandung pengertian konsep pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan.
2. Program Pendidikan Menengah Universal (PMU) dalam kerangka makro kebijakan pendidikan nasional merupakan suatu lompatan kebijakan yang signifikan. Pengembangan kebijakan ini dalam upaya meningkatkan kualitas penduduk Indonesia guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa, peningkatan kehidupan social politik serta kesejahteraan masyarakat.
3. Nilai keinovatifan program PMU terletak pada kekhasan program PMU, kebaruan Program PMU yaitu wajar 12 tahun yang merupakan keberlanjutan dari wajar 9 tahun yang belum pernah ada sebelumnya. Selain itu keinovatifan program PMU dapat dilihat dari unsur kualitatif, bersifat diusahakan dan dilihat dari program PMU memiliki unsur meningkatkan kemampuan. Unsur lain keinovatifan PMU dapat dilihat dari pergeseran paradigma kebijakan pendidikan dan kebudayaan yang mendasari pelaksanaan program PMU.
4. Karakteristik keinovatifan PMU dapat dilihat dari unsur-unsur keuntungan relatif dan kompatibilitas yang relatif tinggi. Karakteristik keinovatifan PMU jika dilihat dari unsur kompleksitas, *triability* dan *obsevability* relatif rendah.
5. Proses difusi program PMU yang sudah berjalan relative masih terbatas belum menyeluruh mencapai khalayak sasaran yang menjadi target sebagai system sosial tempat diimplementasikannya program PMU. Sehubungan dengan hal itu maka tingkat keteradopsiannya masih relatif belum tinggi yang diukur dengan jumlah khalayak sasaran yang telah mengadopsi program PMU.
6. Peran agen pembaharu dan *opinion leader* dalam proses difusi PMU masih terbatas dan relatif belum maksimal.
7. Perubahan sosial yang mungkin akan terjadi sebagai dampak dari inovasi program PMU dapat berupa dampak positif dan dampak negatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Kemendiknas, 2013, *Kebijakan Permendiknas No 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal*, Jakarta, Lemabran Negara
- Kemendikbud, 2010, *Renstra Kemendikbud 2010-2014*, Jakarta
- Rogers, Everet M, 1983. *Diffusion of Innovations*, The Free Press, A Division of Macmillan Publishing Co., Inc. New York, N. Y. 10022